

IMPLIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA PADANG

Boby Firman¹, Darmini Roza², Boy Yendra Tamin¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Eka Sakti

Email : ardhana80corpora@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah UU No. 2 Tahun 2011, Partai Politik mendapat bantuan keuangan yang disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah. Tujuan dari bantuan keuangan tersebut adalah ditujukan untuk administrasi partai dan pendidikan politik. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana implikasi bantuan keuangan Partai Politik terhadap pendidikan politik di Kota Padang, selain itu tesis ini juga melakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi oleh Partai Politik dalam mengalokasikan dana bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan politik di Kota Padang serta cara mengatasi kendala tersebut. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori legal system, teori kemanfaatan hukum dan teori hukum sebagai alat pengubah masyarakat. Hasil temuan dan pembahasan terlihat implikasi bantuan keuangan Partai Politik tersebut hanya berimplikasi terhadap pendidikan politik terhadap kader Partai Politik, hal ini terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Politik. Kendala yang dihadapi oleh Partai Politik dalam mengalokasikan dana bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan politik adalah aturan yang terdapat pada UU tidak ditafsirkan secara benar oleh Partai Politik, besaran dana pada masing-masing partai dan daerah tidak sama, permasalahan akuntabilitas Partai Politik dan sanksi yang sumir. Solusi dan strateginya adalah, melakukan sosialisasi mengenai peruntukkan dana bantuan keuangan Partai Politik dan pendidikan politik masyarakat, mencairkan dana bantuan keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan tahun anggaran yang ditetapkan pemerintah yaitu pada awal tahun, menetapkan standar minimum bantuan keuangan Partai Politik yang akan diberikan kepada Partai Politik per suara harus sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik, Kepastian Hukum

THE IMPLICATIONS OF POLITICAL PARTY FINANCIAL ASSISTANCE ON THE IMPLEMENTATION OF POLITICAL EDUCATION IN THE CITY OF PADANG

Boby Firman¹, Darmini Roza², Boy Yendra Tamin¹

¹ Master degree of legal studies of Bung Hatta University

² Master degree of legal studies of Eka Sakti University

Email : ardhana80corpora@gmail.com

ABSTRACT

Article 34 of Law No. 2 of 2008, changes of Law No. 2 of 2011, political parties get financial assistance provided by the APBD of each region. The purpose of the financial assistance is for party administration and political party education. The problem discussed in this thesis is how the implications of political party financial assistance for political education in the city of Padang, In addition, this thesis also analyzes the obstacles faced by political parties in allocating political party financial assistance funds for political education in Padang city and how to overcome them. The theory used is the theory of legal certainty, legal system theory, the theory of the usefulness of law and legal theory as a means of changing society. The findings and discussion show that the implications of political party financial assistance only have implications for the political education of cadres of political parties, this can be seen from the activities carried out by political parties. The obstacle faced by political parties in allocating funds for political party financial assistance to political education is the rules contained in laws that are not properly interpreted by political parties, the amount of funds in each region is not the same, the problems of accountability of political parties and sumir sanctions. The solution and strategy is to disseminate information about the allocation of political party financial aid and political education, disburse funds for political party financial assistance and public political education, disburse financial funds from political parties in accordance with the provisions of the government budget at the beginning of the year, establishing minimum standards of political party financial assistance to be given to political parties per vote must be in accordance with the provisions of the applicable legislation.

Keywords: Political Party Financial Assistance, Political Parties, Legal Certainty